

Peran Politis Agama dalam Konteks Indonesia yang Plural

“Aspirasi atau Inspirasi”¹

Agus Supratikno

agoes.rndpr@gmail.com

Abstract

The violence on behalf of the religion continue to occur in this beloved land of Indonesia. Since of the Bali bombing, the Marriott bombing, the conflict in Ambon, Maluku, Poso, the burning of a mosque in Papua and the latest event of burning several churches in Aceh. Thousands of people were injured, and hundreds of lives lost, become victims of the events of the violent tragedy. The violence, leaving trauma, fear and psychological disorders that are not easy to cure. Why 'religion' seems to be something inseparable with violence. Why religion is considered as an holy entity became the foundation for doing acts of violence and even loss of the lives of others. Is there anything wrong in the way we embodies religious life? How the role of religion which is more appropriate in the Indonesia context ? Based on the reflection, the writer try to dig, lift and try to compare two political role of religion: “the aspiration and inspiration”, and which one is more appropriate to the context of Indonesia and certainly more guarantee for a peaceful, just and prosperous for all Indonesian citizens.

Keywords: Indonesia, Religion, Political, Aspiration, Inspiration, Thick, Thin, Plural.

Purwa-Wacana

Ada Apa dengan Agama?

Bila kita menyimak sejenak berbagai perilaku kehidupan beragama beberapa waktu terakhir ini dalam konteks kehidupan bangsa Indonesia maka kita merasakan 'api' semangat kebersamaan dan cinta damai dalam agama nampaknya hampir padam, tinggal “arangnya” atau bahkan “abunya”. Berbagai kekerasan bernuansa agama terjadi silih berganti dari peristiwa Bom Bali, Bom Marriot, Konflik Ambon, Maluku, Poso, dan peristiwa terbakarnya sebuah Masjid di papua dan pembakaran gereja-gereja di Aceh. Sudah ratusan orang terluka dan ratusan atau bahkan ribuan nyawa melayang, menjadi korban peristiwa-peristiwa

¹ Judul ini terinspirasi dari kumpulan tulisan Beni Susetyo dalam buku *Vox Populi Vox dei*, dengan judul “Agama sebagai Inspirasi bukan Aspirasi” (Malang: Averroes Press, 2004), 142.

tragedi kekerasan tersebut. Peristiwa kekerasan tersebut menyisakan trauma, ketakutan dan gangguan psikologis yang tak terhitung dan tak mudah untuk disembuhkan. "Dengan alasan perjuangan politik, sosial, ekonomi, sudah mempersyaratkan kematian dan mengabsahkan pembunuhan masal apabila sudah berdogma agama".² Aneh bin ajaib orang ber-agama justru buas terhadap sesamanya manusia yang mestinya dibela harkat dan martabatnya justru tidak dimanusiakan. Mungkin benar kata Thomas Hobbes, *homo homini lupus*. Manusia beragama telah kehilangan nurani ke-beragamaannya, hasilnya nilai-nilai kemanusiaan yang ada dalam agama terlupakan. Jati diri sebagai manusia beragama pun menghilang entah kemana? "Karakter keimanan sebagai suatu substansi yang harus diraih, gagal kita bangun. Keimanan bukan untuk menyayangi makhluk lainnya, tetapi justru untuk membunuh, dengan segala macam cara".³ Semua peristiwa yang bermuara atau dimuarakan pada agama sebagai biang keladinya mengharuskan kita merefleksikan kembali hakikat dan makna keberagamaan kita dalam tatanan kehidupan bermasyarakat dan berbangsa, yang dirasakan semakin mengalami degradasi kualitas.

Adakah yang salah dalam cara kita beragama, berbangsa, bermasyarakat dan berperikehidupan? Sudahkah agama kehilangan spiritualitasnya atau kehilangan roh kesejatian dari keberagamaannya? Mengapa agama menjadi begitu mudah dipakai sebagai pemicu terjadinya kekerasan dan konflik? Apakah sebenarnya yang menjadi penyebab utama dari segala kekerasan dan konflik yang dimuarakan kepada agama.

Mengapa Agama

Berbagai tragedi kekerasan yang bermuara atau dimuarakan pada agama sebagai sumber penyebabnya adalah merupakan masalah yang besar bagi perdamaian di bumi Pertiwi yang plural.⁴ Mengapa 'agama' seolah menjadi sesuatu yang tak terpisahkan dengan kekerasan. Mengapa agama yang dianggap sebagai "entitas" suci justru menjadi pijakan bagi dilakukannya tindakan kekerasan bahkan penghilangan nyawa sesamanya. Sejak kapan agama melahirkan

² Benny Susetyo, *Vox Populi Vox Dei* (Malang: Averroes Press, 2004), 142.

³ Ibid, 143.

⁴ Indonesia berpenduduk 200 juta jiwa dengan 6000 pulau yang didiami, yang memiliki lebih dari 250 bahasa daerah yang terdiri dari lebih kurang 250 etnis dan sub etnis, dan juga adanya berbagai agama dan kepercayaan adalah benar benar suatu komunitas yang beragam.

kecurigaan, kebencian, permusuhan dan keinginan untuk saling meniadakan. Berikut ini beberapa analisis sosial, Pelembagaan Agama. Menurut Noorhalis, agama cenderung menjadi sebuah 'masalah' ketika agama itu menjadi sesuatu yang terlembagakan, Agama mengecil menjadi sebuah penamaan dan bahkan mengecil lagi menjadi masjid, gereja, vihara, majelis ulama, majelis gereja, keuskupan, partai agama, atau bahkan negara agama. Lebih kecil dari itu agama bahkan menjadi lembaran-lembaran bendera dan lambang-lambang. Dan sejak itulah kekerasan mulai menyemaikan benihnya.⁵

Dan ketika simbol-simbol diletakkan sebagai kebenaran itu sendiri, simbol-simbol itu menjadi bersifat merusak (*destroy*). Bukan makna di balik simbol tetapi bentuk fisik simbol yang diutamakan. Agama gagal membangun karakter keimanan, karena terjebak dalam persoalan simbol-simbol di atas. Pemeluk agama terjebak dalam persoalan kuantitas dan bukan pada kualitas keimanannya. Sebagai akibatnya ketika simbol-simbol agama yang dianutnya diperlakukan secara tidak semestinya meledaklah menjadi sebuah tindakan kekerasan atas nama agama.

Terbelenggunya dan matinya menaisme lokal. Dalam masyarakat kita sebenarnya telah memiliki kekayaan budaya yang dapat menjadi sumber cara tersendiri bagi penyelesaian masalah-masalah yang muncul tanpa berlatar belakang SARA. Artinya, isu SARA bukan hal yang utama yang menyebabkan orang tidak bisa berkomunikasi. Zuly Qodir mendefinisikannya sebagai *local religius*, *local tradition*, semacam kearifan-kearifan tradisional, *local culture* dan sebagainya yang memungkinkan terjalinnya hubungan yang harmonis, mencegah disintegrasi.⁶

Tidak berfungsinya mekanisme lokal, dikarenakan "kekuatan lokal" selama rezim orde baru kurang mendapatkan perhatian bahkan cenderung dimatikan. Akibatnya jelas, mekanisme penyelesaian masalah oleh masyarakat mengalami kebuntuan dengan penuhnya kepentingan birokrasi penguasa. Darimana kemudian dimunculkan logika penyelesaian masalah lokal, dari atas ke bawah (*top down*). Selanjutnya yang terjadi adalah mekanisme penyelesaian masalah bukan

⁵ Noorhalis M, "Agama dan Kekerasan" dalam Newsletter Interfidei, edisi khusus 2003, p. 10.

⁶ Zuly Qodir, Agama dalam Bayang-Bayang Kekuasaan, Yogyakarta: DIAN/INTERFIDEI, 2001. p.24.

pada akar masalah yang ada tetapi sekedar seremoni-seremoni.⁷ Model penyelesaian seperti itu seringkali hanya berada dipermukaan dan tidak menyentuh akar masalah yang sebenarnya sehingga masih menyimpan potensi konflik yang sewaktu-waktu muncul kembali ketika ada pemicunya. Dan model-model penyelesaian tersebut ternyata masih pertahankan di era reformasi sekarang ini.

Politisasi Agama. Agama dijadikan kendaraan politik oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan politik kekuasaan. Agama dipakai sebagai alat atau kendaraan untuk mencapai tujuannya. Sebaliknya bisa juga politik "ditunggangi" oleh agama sehingga persengketaan, permusuhan, dan peperangan atas nama agama tidak terelakkan.⁸ Agama seringkali menjadi alat yang efektif untuk menjaring masa dan menjadikan mereka menjadi pengikut yang setia terhadap perjuangan politik yang biasanya dibungkus dan dilegitimasi agama. Kemasannya agama tetapi isinya adalah politik kekuasaan. Sebaliknya juga bisa terjadi bahwa politiknya sebagai kendaraan bagi agama artinya visi dan misinya adalah perjuangan agama tetapi memakai "kendaraan politik".

Pemahaman agama yang eksklusif. Pemahaman agama yang eksklusif dalam masyarakat kita, menumbuhkan fanatisme sempit, intoleran. Hal itu seringkali disebabkan adanya pertikaian tentang *truth claim* dalam teologi agama. "*Truth claim* ini membentuk interpretasi yang tunggal bahwa hanya pemikiran, keyakinan, pengalaman, dan prosedur-prosedur yang mereka milikilah yang dapat diterapkan sebagai solusi terbaik."⁹ Hal itu menimbulkan sikap superioritas yang menganggap rendah agama lain, dan berlomba-lomba mengatakan agamanyalah yang paling benar dan yang lain salah. Selanjutnya eksklusifisme agama ini juga menumbuh kembangkan sikap intoleran terhadap agama lain, bahkan bukan hal yang mustahil menumbuhkan radikalisme agama yang melahirkan tindakan kekerasan terhadap pemeluk agama lain.

Melihat kenyataan-kenyataan di atas maka perlu bagi kita untuk memikirkan ulang (*rethinking*) peran politis agama yang sesuai dengan konteks ke-Indonesian yang plural. Dalam kaitan dengan pembahasan tentang peran politis

⁷ *ibid.*

⁸ *ibid.*, p.131.

⁹ Eko Saputro, " fundamentalisme Islam" Imajinasi Tanpa Tepi, dalam, *Memahami Wajah Para Pembela Tuhan*,.Yogyakarta: Dian/Interfidei, 2004, p. 8.

agama dalam konteks ke-Indonesiaan tersebut secara khusus penulis akan memaparkan dua peran politis agama yaitu peran "aspirasi dan inspirasi". Dengan membandingkan kedua peran tersebut diharapkan dapat dibandingkan peran politis agama yang lebih cocok dan sesuai dengan konteks Indonesia yang plural. Pada akhir dari pembahasan akan dikaji kedua peran politis tersebut dari "kacamata" teori sosial politik Michael Walzer, *Thick and Thin, Moral Argument at home and Abroad* dan secara khusus berkaitan dengan peran yang mesti dimainkan oleh gereja penulis mencoba mengangkat wacana dari Glenn Stassen dalam bukunya: *Just Peacemaking*,

Agama Sebagai Aspirasi

Definisi beberapa Istilah

Agama dalam tulisan ini dipahami sebagaimana pemahaman Eka Darmapuetra dalam artikelnya tentang hubungan negara dan agama. Istilah "agama" tidak menunjuk pada satu agama baik dalam pengertian "*a certain religious group*" maupun dalam pengertian "*a general imagery religion*", tidak juga menunjuk pada satu-satu agama, tetapi menunjuk pada semua agama yang ada sekaligus. Istilah "sekaligus" yang saya maksudkan adalah agama-agama dalam spesifikasi dan identitasnya masing-masing, dan pada saat yang sama juga saling terkait tak terpisahkan didalam kategori bersama. Implikasinya adalah bahwa setiap kebijakan yang menyangkut agama dan negara, seyogianyalah dibuat sedemikian rupa dengan mempertimbangkan secara seimbang baik kemajemukan, kesetaraan, maupun kebersamaan (*plurality, equality, commonality*) semua agama yang ada.¹⁰

Sedangkan kata aspirasi berasal dari kata *aspiration* yang diartikan sebagai aspirasi, cita-cita.¹¹ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata aspirasi dijelaskan sebagai harapan atau tujuan untuk keberhasilan di masa yang akan datang.¹² Cita-

¹⁰ Eka Darmapuetra, "Bukan Keterpisahan Tapi Kemitraan" Beberapa catatan sekitar hubungan agama dan negara: refleksi seorang Kristen Protestan, dalam buku *Etika Politik dalam Konteks Indonesia*, Yogyakarta: Kanisius, 2001, p. 118.

¹¹ John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 2000.

¹² Anton M. Moelyono, ed. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990, p. 53.

cita diartikan sebagai, (1) keinginan (kehendak) yang selalu ada di dalam pikiran, (2) tujuan yang sempurna yang akan dicapai atau dilaksanakan.¹³

Ketika suatu agama dijadikan sebagai aspirasi maka agama dijadikan sebagai sebuah cita-cita, tujuan yang sempurna yang akan dicapai. Dan bila komunitas agama menjadikan agamanya sebagai aspirasi, bukan saja bagi kehidupan umat pemeluknya, tetapi juga sebagai aspirasi dalam kehidupan berbangsa, maka kecenderungan-kecenderungan yang terjadi adalah sebagai berikut:

Fundamentalis Agama

Munculnya fenomena gerakan fundamentalis Islam di Indonesia beberapa waktu terakhir ini, yang berkeinginan untuk memperjuangkan berdirinya negara Islam dan pemberlakuan syariat Islam semisal adalah contoh dari perjuangan komunitas agama menjadikan agama sebagai aspirasi, meskipun itu sebagai respon terhadap realitas sosial yang ada, sebagaimana disitir oleh Eko Prasetyo, "Walaupun dalam berbaris mereka seperti sebuah gelombang anak muda yang berseragam sama, bersorban sama, sama-sama berjenggot, akan tetapi mereka menyimpan sebuah gagasan tentang kerajaan Tuhan yang tidak tunggal. Horison pengetahuan keagamaan mereka yang berbeda-beda hanya diikat oleh sejumlah keprihatinan yang sama-sama mendalam mengenai, (1) nasib Islam sebagai agama yang kalah baik secara ekonomi dan politik makin menempatkan mereka sebagai umat yang meskipun mayoritas tetapi berada dalam kedudukan yang teralienasi. Padahal sejarah yang mereka baca dan dengar begitu kemilau dengan tokoh-tokoh yang memiliki integritas dan suci (2) sekulerisme yang dipahami sebagai paham yang memisahkan agama dengan kehidupan ekonomi, politik dan sosial dinilai sebagai biang keladi kemunduran dan ambuknya kejayaan Islam. Dan sekulerisme tumbuh menyebar dalam sistim pendidikan, kebudayaan bahkan yang jauh membahayakan pada alam pemikiran. Bersama dengan sekulerisme juga menyeruak berbagai sistim ekonomi kapitalistik yang mengeksploitasi sumber kekayaan umat (3) terakhir adalah perilaku politik Amerika yang menggunakan standar ganda khususnya pada wilayah dimana umat Islam berkedudukan sebagai mayoritas, sebagaimana di Palestina maupun dikawasan Timur Tengah lainnya.

¹³ Ibid, p. 169.

Kebencian pada Amerika ini menjadi lebih beralasan mengingat propaganda anti terorisme yang dengan gencar mengambil sasaran umat Muslim."¹⁴

Realitas-realitas di depan mata mereka, realitas-realitas yang mereka hidupi yang tidak sesuai dengan harapan mereka menjadikan gerakan fundamentalis Islam di Indonesia bangkit menyeruak dengan api semangat yang berkobar-kobar berjuang dengan *truth claim* yang mereka yakini sebagai satu-satunya kebenaran. Apa yang pertama, dan salah satunya yang mereka perjuangkan adalah berdirinya sebuah negara Islam atau sedikitnya diberlakukannya syariah Islam. Dan perjuangan untuk menegakkan aspirasi agama mereka menjadi lebih klop dan mendapatkan momen yang tepat, karena mereka tinggal di negara yang saat itu, bahkan sekarang (meskipun sekarang sudah ada perubahan ke arah yang lebih baik dan stabil) sedang mengalami seabrek masalah yang bersifat multidimensi. Di bidang ekonomi terjadi berbagai macam ketimpangan dan keterpurukan, di bidang politik para elit politik justru penuh dengan "dagelan" dan seringkali perilaku politik mereka hanya berorientasi pada perebutan kekuasaan (*powers oriented*), tidak memihak rakyat kecil. Ditambah lagi perasaan bahwa umat Islam sebagai warga mayoritas justru terus menerus dipinggirkan dan dikorbankan atau menjadi korban. Berlarut-larutnya kasus konflik Ambon dan Poso beberapa waktu lalu juga menumbuhkan pemahaman bahwa pemerintah tak dapat menyelesaikan konflik tersebut dan tidak mampu melindungi umat Islam.

Rupanya para penguasa yang juga adalah "politisi" memiliki mata "rajawali" untuk mengambil momen ini sebagai kesempatan untuk memperoleh legitimasi akan kekuasaannya sehingga terjadilah proses "tanggung menanggung" antara politik (penguasa) dan agama, terjadilah "perselingkuhan" antara "agama" dan "politik". Pemberlakuan syariah Islam di beberapa daerah mengikuti diberlakukannya otonomi daerah adalah salah satu fenomena yang beraroma "perselingkuhan" tersebut, tentu hal ini perlu dikaji lebih lanjut, apakah sebenarnya yang terjadi di balik munculnya perda-perda syariah tersebut. Apakah kepentingan politik kekuasaan yang mencoba membangun dengan legitimasi agama ataukah sebaliknya?

Sebagai refleksi tentang relasi agama, masyarakat dan negara, menarik dicatat di sini kecenderungan yang muncul belakangan ini, yakni gagasan

¹⁴ Eko Prasetyo dalam Buku Memahami Wajah Pembela Tuhan, p.13-14.

penerapan syariat Islam secara bertahap di beberapa daerah melalui struktur kekuasaan pemerintahan lokal. Preseden kecenderungan tersebut setidaknya terlihat di Pamekasan, Cianjur, Garut, Ciamis, Indramayu, Tasikmalaya, dan Sulawesi Selatan. Muatan dan tahap penerapannya cukup beragam. Di Pamekasan didahului dengan anjuran berjilbab di kalangan instansi pemerintah dan lembaga pendidikan. Selain itu juga telah dikeluarkan aturan tentang sholat berjemaah bagi PNS yang beragama Islam. Di Cianjur pemerintah membuat percontohan “perkampungan Islam” yang menerapkan syariat Islam berdasarkan Al-Quran dan Hadits. Sementara itu, di kabupaten Maros, Sulsel, dikeluarkan surat edaran kewajiban PNS pria memakai baju koko dan peci pada hari Jum'at dan bagi perempuan berjilbab sepanjang pekan.¹⁵

Di satu pihak komunitas “agama” bangkit untuk memperjuangkan cita-cita agama mereka sebagai respon terhadap carut marut dan menurunnya moral bangsa. Di pihak lain penguasa juga membutuhkan legitimasi agama mayoritas. Dalam ungkapan Jawa hal itu diistilahkan sebagai “*tumbu ketemu tutup*” menjadi klop dan pas. Karena keduanya saling membutuhkan satu dengan yang lain sehingga terjadilah kemungkinan-kemungkinan semacam “perselingkuhan” antara agama dan politik atau sebaliknya “politik dan agama”.

Partai Berbasis Agama

Runtuhnya Orde Baru dan munculnya era reformasi memang mempengaruhi perkembangan politik di Indonesia. Salah satunya adalah lahirnya partai-partai bernuansa agama. Apakah sebenarnya yang melatar belakangi munculnya partai-partai bernuansa agama itu? Apa yang sebenarnya mereka perjuangkan, tentu aspirasi-aspirasi mereka? Pertanyaan selanjutnya, aspirasi yang bagaimana yang mereka perjuangkan? Tentu aspirasi berdasarkan pemahaman norma-norma keagamaan yang mereka yakini. Akan tetapi mungkin harus diakui, bahwa di sini seringkali juga terjadi “tumpang tindih” antara kepentingan agama dan kepentingan politik. Hal itu menimbulkan pertanyaan apakah partai-partai bernuansa agama hendak memperjuangkan kepentingan agama atau sebaliknya memakai agama untuk kepentingan politik. Agama dipakai sebagai alat politik ataukah politik dipakai sebagai alat agama. Agama dipakai sebagai alat politik,

¹⁵ Suhadi, “Gejala Bergesernya “Tembang Ilir-ilir” menjadi “Perda Syariat Islam” dalam *Newsletter Edisi Khusus 2003*, Yogyakarta; Dian/Interfidei.

misalnya pemakaian simbol-simbol, logo-logo agama hanyalah alat untuk "menjala/menjaring" massa dan melegitimasi kepentingan politik dengan agama. Artinya kepentingannya tetap politik kekuasaan tetapi "kemasan" yang dipakai adalah agama. Karena agama sifatnya hanyalah sebagai "kemasan" untuk menarik massa, maka agama dipakai hanya untuk mencapai kepentingan sesaat, artinya ketika dibutuhkan dipakai dan ketika sudah tidak diperlukan ditinggalkan, dan yang dipakai "kemasan" lain yang lebih menarik, untuk dapat mencapai tujuan utamanya yaitu kepentingan politik kekuasaan. Di sini agama justru akan mengalami distorsi makna bahkan desakralisasi. Sebaliknya jika politik dipakai sebagai alat agama artinya kepentingan yang hendak diperjuangkan adalah misi agama dan "kendaraan" yang dipakainya adalah politik melalui jalan partai. Seringkali orang berpikir bahwa ini lebih bersifat mulia, karena kepentingan yang hendak diperjuangkan adalah kepentingan agama, misi agama. Selanjutnya misi agama dianggap sebagai misi suci bahkan amanat Allah. Selanjutnya, ketika kepentingan agama sudah dianggap sebagai sama dengan kepentingan Allah, maka hal itu harus diperjuangkan dengan segala daya dan upaya. Aspirasi agama yang satu dan yang lain dengan *truth claim* dan *salvation claim* masing-masing, menjadikan agama saling berhimpitan untuk mencari jalan untuk mencapai kemenangan. Pada akhirnya agama yang satu dan yang lain ada dalam posisi diametrikal, saling berhadapan untuk memperjuangkan aspirasi dari agama masing-masing. Hal ini jelas menyuburkan tumbuhnya politik identitas yang justru menjadikan Indonesia semakin terkotak-kotak dalam sekat-sekat agama. Ketika agama dipakai sebagai kendaraan bagi kepentingan politik kekuasaan justru dapat mengakibatkan desakralisasi agama, terlebih jika para pelaku politik dari partai yang bernuansa agama tersebut jatuh kedalam praktek korupsi, agama justru menjadi bahan "ejekan". Dari pemaparan di atas peran agama sebagai aspirasi dalam negara plural seperti Indonesia, memiliki resiko menjadikan bangsa Indonesia semakin terkotak-kotak dalam sekat-sekat agama dan lebih berpotensi terjadinya diskriminasi bahkan tindakan kekerasan terhadap warga bangsa yang memeluk agama lain yang berbeda.

Agama sebagai Inspirasi

Agama sebagai inspirasi artinya agama sebagai sesuatu yang memberikan ilham. Peran politis agama sebagai bersifat inspirasional, yang mendatangkan

ilham. Peran sebagai yang memberikan ilham di sini berarti membangkitkan pengaruh bagi kehidupan masyarakat, berbangsa dan berperikehidupan. Berbeda dengan peran sebagai aspirasi, di mana cita-cita agama diperjuangkan untuk menjadi cita-cita bangsa dan norma-norma agama dilaksanakan sepenuhnya secara harfiah. Peran sebagai inspirasi, norma-norma agama tidak diberlakukan secara harfiah tetapi memberi ilham bagi perikehidupan masyarakat dan berbangsa yang berketuhanan dan berperikemanusiaan. Sebagaimana Gus Dur menjelaskan berkaitan dengan konsep negara Islam: "...sebuah negara telah memiliki "watak Islam" kalau inti ajaran Islam telah diakui-seperti Ke-Esa-an Tuhan. Islam berfungsi inspirasional: menjadi sumber yang mendorong munculnya legislasi dan pengaturan negara yang manusiawi namun tidak menentang ajaran Islam. Katakanlah pandangan "minimalis"¹⁶ Di samping pandangan minimalis ada juga paham "optimalis" dalam Islam, yang menginginkan ajaran Islam dilaksanakan sepenuhnya, dan kalau dapat secara harfiah. Sebuah negara harus di-islamkan" kalau belum benar-benar Islam secara tuntas.¹⁷

Berpijak pada peran inspirasional yang juga diistilahkan sebagai peran "minimalis" maka yang paling penting adalah bahwa "inti" dari ajaran agama atau nilai-nilai universalitas agama memberi pengaruh bagi terlaksananya pengaturan negara yang berkeadilan bagi semua warga negara yang berbeda latar belakang agama yang berbeda. Ajaran-ajaran universal agama menginspirasi bagi munculnya aturan-aturan Negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai, kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan. Masyarakat Indonesia adalah bersifat sangat majemuk, memiliki latar belakang yang sangat beragam baik agama, suku, ras, kepercayaan, budaya, bahasa, tradisi-tradisi, ideologi politik, dan sebagainya, Karena itu diperlukan sebuah aturan main bersama yang disepakati sebagai tatanan kehidupan bersama sebagai sebuah bangsa dan Negara.

Thick and Thin, Moral Argument At Home and Abroad

Berkaitan dengan norma-norma kehidupan dalam komunitas yang satu dan yang lainnya berbeda, Walzer memperkenalkan bahwa konsep moral memiliki makna maximal dan minimal, ia mengistilalkannya sebagai "*thick and thin*" , moral

¹⁶ Gus Dur, *Mengurai Hubungan Agama dan Negara*, Jakarta: Grasindo, 1999, p. 65.

¹⁷ Ibid.

“tebal dan tipis” dan keduanya berkenaan dengan konteks yang berbeda, bagi maksud yang berbeda.¹⁸

Nilai-nilai moral *maximalis* adalah moral yang ada dan dihidupi oleh komunitas tertentu dalam konteks tertentu. Sedangkan nilai-nilai moral “*minimalis*” adalah nilai moral yang bersifat universal dimana setiap komunitas pasti memilikinya, Artinya moral tebal adalah nilai moral “*at home*” dan “*thin*” adalah “nilai moral abroad”. *Values* tebal adalah prinsip moral yang dihidupi dalam sebuah komunitas tertentu yang kadang berbeda dengan yang lain, sedangkan moral tipis, nilai-nilai universal yang dapat menjadikan kita bisa berjalan bersama dengan yang lain. Penting dipahami bahwa “nilai-nilai moral tipis” adalah penting bagi kritik dan demi kesetiakawanan. Tetapi tidak bisa menggantikan atau menempati ulang nilai-nilai yang ada dalam moral tebal.¹⁹

Jadi “*thin moral argument*”, nilai-nilai *minimalis*, hanyalah tempat tinggal sementara dimana kita hidup berdampingan bersama dengan yang lain. Tetapi itu bukanlah nilai-nilai yang kita hidupi ketika kita kembali ke konteks di mana kita tinggal. Karena yang *minimal* hanya sebagian dari nilai-nilai *maksimal* yang kita miliki. “Kita berbagi beberapa nilai dengan orang lain, termasuk nilai-nilai yang penting, dimana itu kadang-kadang diperlukan untuk berjalan bersama (kadang untuk berjuang). Tetapi moral yang “*thin*”, *minimal*, bukanlah pondasi untuk moral “*thick*” *maksimal*, hanya suatu bagian darinya.²⁰

Para pendiri bangsa ini sebenarnya telah mempergumulkan kedua moralitas “*thick and thin*” atau “*maximalis dan minimalis*”. Pada saat *founding fathers* bangsa ini hendak memutuskan bentuk dan ideologi negara, mereka bergumul tentang nilai-nilai moralitas tersebut. Pergumulan tentang bentuk dan ideologi negara tersebut terutama disebabkan oleh majemuknya masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai macam agama, suku, ras, dan juga berbagai ideologi politik yang ada dan bertumbuh di Indonesia.

Ideologi-ideologi yang masuk ke Indonesia pada saat itu ada dua macam, yaitu *pertama*, ideologi sekuler (nasionalisme, kapitalisme, sosialisme, dan komunisme) yang menghendaki agar jangan sampai agama yang menjadi salah

¹⁸ Michael Walzer, *Thick and Thin, Moral Argument a Home and Abroad*, London: University of Notre Dame Press, 1994, p. 2.

¹⁹ Ibid, p. 16-17.

²⁰ Ibid, p. 18.

satu kekuatan penentu dalam kehidupan kenegaraan. Negara harus netral dalam soal agama. *Kedua*, ideologi universal yang ada di Indonesia, yaitu yang menginginkan agar agama menjadi kekuatan penentu (utama) dalam kehidupan bernegara atau negara teokratis (negara syariah). Jadi negaranya yang bertanggung jawab pada dilaksanakannya syariat. Sudah tentu tak dapat dihindari, lambat laun menjadi perdebatan sengit, ketika bangsa Indonesia mau merdeka. Tahun-tahun 1930-an Mohamad Nasir, Agus Salim, Tan Malaka, Soekarno, Mohammad Hatta, Syahrir, semuanya terlibat dalam perdebatan sengit, tentang bentuk negara dan dasar negara Indonesia jika merdeka nanti. Sampai dua belas tahunan perdebatan antara ideologi sekuler dan teokratis ini. Keduanya sama-sama ideologi dunia yang hendak diterapkan di Indonesia. Ketika Jepang kalah oleh sekutu, perdebatan mencapai puncaknya. Mau negara apa, yang agama atau negara sekuler? Yang sekuler tidak dapat memaksakan sekulerisme mereka, sebaliknya yang teokratis (Islam) juga menyadari bahwa negara teokratis pada masa Rasulullah di Madinah tidak mungkin diterapkan di Indonesia artinya seorang presiden (kepala negara) sekaligus yang menjadi penentu segalanya, ini tidak mungkin. Ini semua menunjukkan sudah terjadi proses kesamaan titik pandang bahwa kedua macam ideologi dunia ini tidak mungkin dilaksanakan di Indonesia, karena itu harus dicari titik temu: namanya Republik Indonesia. Ideologinya apa? Ideologi yang khusus diciptakan untuk bangsa Indonesia sendiri, guna mempertautkan unsur-unsur ideologi yang ada di Indonesia. Dengan kata lain bahwa Pancasila adalah ideologi nasional yang dimaksudkan untuk menyimpulkan semua ideologi besar dunia dalam pelaksanaannya di Indonesia.²¹

Para pendiri bangsa (*founding fathers*) ini sebenarnya telah mempergumulkan sebuah bentuk negara yang paling tepat dengan konteks Indonesia yang plural. Ketika *founding fathers* bangsa ini hendak memutuskan bentuk dan ideologi negara, mereka bergumul tentang nilai-nilai tersebut. Indonesia yang memiliki keragaman yang luar biasa dari sisi agama, suku, ras, budaya, afiliasi politik, tentunya tidak mudah untuk menyatukannya. Pergulatan politik yang terus terjadi pasca Indonesia merdeka, benar-benar menguras tenaga dan pikiran untuk menentukan bentuk dan ideologi negara yang tepat sesuai dengan konteks ke Indonesiaan. Bentuk dan Ideologi Negara yang bisa mengayomi semua warga bangsa apapun latar belakangnya.

²¹ Gus Dur, *Mengurai Hubungan Agama dan Negara*, p. 83-85.

Ideologi Pancasila merupakan moral "minimalis" dari berbagai moral "maximalis" yaitu unsur-unsur ideologi yang hidup di Indonesia pada saat itu. Di sini kita melihat bahwa nilai-nilai religius menginspirasi lahirnya sila pertama ke-Tuhan-nan. Karena para penganut ideologi sekuler menyadari bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa religius. Sebaliknya para penganut paham teokratis yang menginginkan negara agama juga menyadari bahwa hal itu tidak mungkin diterapkan mengingat fakta historis Indonesia yang bersifat plural. Karena penting bagi segenap anak bangsa apapun latar belakang suku, ras, agama, dan afiliasi politiknya perlu kembali mengingat dan merenungkan apa yang telah dengan susah payah dipergumulkan, diperjuangkan, dan dibangun oleh para pendiri bangsa, khususnya berkaitan dengan UUD 1945 dan Pancasila. Ketika kesepakatan-kesepakatan terlupakan atau dilupakan dan dibuang ditempat "sampah" karena dianggap tidak relevan lagi, maka terbukalah pintu gerbang bagi terjadinya disintegrasi bangsa. Ancaman disintegrasi nasional maupun anarki sosial yang seringkali terjadi dan kita alami sekarang ini, sumber utamanya antara lain adalah digugat dan dicampakannya kesepakatan-kesepakatan lama secara serta merta dan nyaris semena-mena, dan sayangnya tanpa diikuti oleh upaya yang sama seriusnya untuk mencapai dan merumuskan kesepakatan-kesepakatan baru.²²

Bercermin kepada fakta-fakta sejarah kehidupan bangsa yang pernah mengalami gejolak baik dalam ranah politik maupun agama, perlu bagi kita untuk kembali merefleksikan hakikat keberagamaan kita yang kontekstual dan menempatkan peran politis agama dalam porsi yang sesuai dengan kehidupan masyarakat dan negara Indonesia yang plural. Mengingat masyarakat Indonesia berlatar belakang bukan hanya dari satu agama tetapi dari berbagai agama dan kepercayaan. Karena itu norma-norma suatu agama tidak seharusnya diberlakukan secara harfiah sebagai "syariat" tetapi bagaimana norma-norma dalam agama itu dihidupi oleh penganut agamanya sendiri-sendiri dan memberi pengaruh inspiratif positif bagi kehidupan bersama sebagai satu bangsa yaitu bangsa Indonesia. Sehingga peran insiprasional agama ini akan memberikan kontribusi yang positif bagi terciptanya kehidupan bersama sebagai sesama anak bangsa yang aman, damai, adil, sejahtera di negara Indonesia yang tercinta ini.

²² Eka Darmaputra, *Bukan Keterpisahan tapi Kemitraan*, p. 121.

Bagaimana dengan Gereja

Di atas telah dibahas tentang peran politis agama dalam kehidupan Negara yang masyarakatnya plural, dan telah pula dipaparkan dua peran politis yaitu aspirasi dan inspirasi, di mana peran agama sebagai aspirasi lebih berpotensi membawa kepada disintegrasi bangsa, dibanding peran agama sebagai inspirasi. Berdasarkan kajian teori sosial Michael Walzer, *Thick and Thin, Moral Argument At Home and Abroad*, sebenarnya peran inspirasional agama lebih tepat untuk diejawantahkan dalam kehidupan bersama sebagai suatu bangsa. Selanjutnya bagaimana gereja (sebagai bagian dari institusi agama) berperan dalam rangka ikut "berpolitik", mengusahakan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat umum demi kemajuan bangsa sesuai dengan harkat kemanusiaannya dan demi persahabatan dan perdamaian dunia.²³

Gereja dan negara adalah dua entitas yang sama-sama menuntut komitmen dan loyalitas total dari manusia. Demi negara dan agama orang dengan sadar dan ikhlas dan bangga rela mempersembahkan nyawanya. Untuk agama sebagai martir dan untuk negara sebagai patriot. Tak heran, bila dalam hubungan antara agama dan negara terkandung potensi masalah yang tak habis-habisnya. Hampir setiap individu adalah penganut satu agama dan warga sebuah negara. Kedua-duanya menuntut komitmen penuh, loyalitas total dan ketaatan mutlak. Keduanya pun terlibat sebagai rivalitas abadi.²⁴

Fakta sejarah mencatat gereja juga menghadapi "titik tegang" dalam relasi antara negara dan agama, yang melahirkan paham-paham yang ter-polarisasikan. Yewangoe mengistilahkan sebagai "Dua keberatsebelahan": *Pertama*, ditipekan sebagai "gereja negara" di sini negara mendominasi gereja. Dengan demikian segala sesuatu dalam gereja ditentukan negara. *Kedua*, "negara gereja," gereja mendominasi kehidupan bernegara. Nilai-nilai kekristenan yang mestinya berfungsi sebagai pemberi "inspirasi" bagi perumusan dan pengadaan hukum-hukum positif, telah menjadi hukum. Diterapkanlah semacam "syariat" kristen, dengan konsekuensi sanksi-sanksi bagi mereka yang melanggar.²⁵

²³ Edi Purwanto, "Agama Politik dan Negara, Perspektif Katolik", dalam *Agama dan Negara*, Yogyakarta: Dian/Interfidei, 2002, p. 24.. lihat juga Surat Gembala Pra-Paskah Konferensi Wali Gereja Indonesia, April 1997.

²⁴ Eka Darmaputra, P. 122.

²⁵ A.A. Yewangoe, dalam kata Pengantar buku "Agama dan Negara". Yogyakarta: Dian/Interfidei.

Melihat kenyataan sejarah di atas maka gereja penting untuk tidak kembali kepada masa lalu di mana terjadi politisasi terhadap gereja. Ketika kekristenan menjadi "gereja negara" atau sebaliknya "negara gereja". Berkaitan dengan kehidupan gereja yang kontekstual dengan ke-Indonesiaan, penulis melihat bahwa di samping *discourse* tentang *thick and thin* Michael Walzer, *discourse* yang diangkat Stassen dalam bukunya *Just Peacemaking, Transforming Initiative For Justice and Peace* dapat menjadi wacana untuk diaplikasikan oleh gereja dalam rangka menciptakan peran "inspiratif" agama Kristen (baca: gereja) dalam kehidupan bersama sebagai suatu bangsa yaitu bangsa Indonesia yang majemuk. Politik Pacifis Stassen, berbasiskan pada kotbah Yesus di bukit yang sering juga disebut sebagai hukum kerajaan Allah. Stassen melihat ada ironi dalam pandangan orang-orang Kristen yang menganggap bahwa kotbah di Bukit sebagai tidak relevan bagi etika sosial di masa kini. Kotbah di bukit dikatakan sebagai etika idealis yang mustahil dapat diejawantahkan dalam kehidupan sosial di masa kini. Stassen menjelaskan terjadinya "ironi" dalam hidup orang Kristen berkaitan dengan kotbah di bukit sebagai berikut:

Pertama, Ajaran-ajaran Yesus adalah sebagai idealis yang tinggi dan kemudian kita mengelak untuk mengikutinya. Kita menekankan betapa tingginya ideal Yesus, betapa sulit pengajarannya dan tuntutan-tuntutannya. Kemudian kita menyimpulkan pengajarannya terlalu tinggi dan terlalu sulit untuk kita ikuti dan selanjutnya etika lain yang lebih pragmatis. Kedua, melalui penanaman pengelakan ini, menyebabkan distorsi makna terang dari ajaran Yesus, sebagaimana yang kita dengar dan melakukan sabdanya...Ketiga, kotbah di bukit hanya dapat diaplikasikan dalam bidang khusus kehidupan dan tidak otoritatif dalam kehidupan normal...semisal Katolik mengembangkan interpretasi Kotbah di Bukit adalah untuk kebiaraan dan perintah-perintah khusus. Lutheran mengembangkan sebuah pembedaan yang bersifat dualisme. Kotbah di bukit adalah untuk inti, pribadi individu, dalam motifnya, bukan untuk hubungan-hubungan sosial, ekonomi dan politik.²⁶

²⁶ Glenn Stassen, *Just Peacemaking, Transformig Inisiatif For Justice and Peace* (Wesminters: John Knox Pres, 1992), 33-34.

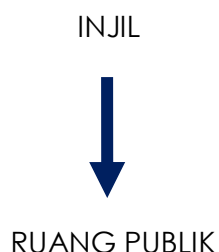
Bagi Stassen kotbah di Bukit bukan suatu ideal tinggi yang tidak bisa diejawantahkan dalam kehidupan sosial. Kotbah di Bukit mestinya dihidupi oleh orang-orang Kristen bukan hanya dalam relasi individual, tetapi juga sebagai etika sosial. Juga bukan etika sosial bagi sebagian kelompok orang sebagaimana diberlakukan dalam kebiaraan dalam gereja Katolik. Kotbah di Bukit adalah merupakan cara transformasi Allah untuk memutuskan mata rantai lingkaran kekerasan yang merajalela dalam dunia yang dirusak oleh dosa.

Kotbah di Bukit bukan hanya tentang perjuangan manusia mencapai ideal-ideal tinggi, tetapi inisiatif transformasi Allah untuk membebaskan kita dari jerat lingkaran setan yang menjerat kita. Itu adalah pandangan yang realistis di dunia kita, yang diwarnai dengan pembunuhan, amarah, perceraian, perzinahan, hawa nafsu, permusuhan, kemunafikan, nabi-nabi palsu dan sebagainya. Hal itu menyatakan bahwa di tengah-tengah perhambaan seperti itu, ada juga kuasa lain yang bekerja: Allah sedang memulai untuk memerintah dengan keadilan dan damai, seperti biji sesawi yang diambil dan ditaburkan di ladang (Matius 13:31-33). Kotbah di Bukit menggambarkan cara spesifik, dimana kita dapat berpartisipasi dalam transformasi yang sedang dilakukan Allah. Bukan tuntutan-tuntutan yang sulit dipenuhi, tetapi metode-metode partisipasi praktis dalam anugerah pembebasan Allah.²⁷

Selanjutnya dalam wacana aplikasi etika sosial yang berbasis pada kotbah di Bukit, Stassen mengangkat pentingnya "*middle axiom*" dalam wacana publik dalam masyarakat yang plural. Dalam wacana publik, dalam sebuah masyarakat yang plural, kita membutuhkan keduanya: (1) sebuah etika Kristen yang eksplisit berbasis kekuatan teks Alkitab, dan (2) sebuah etika publik yang meletakkan pada akal budi, pengalaman, dan kebutuhan yang tidak memberikan penekanan yang sama pada Alkitab dan doa, yang secara eksplisit merupakan sebuah etika Kristen...Ini adalah "etika publik" yang berlandaskan pada pemikiran, rumusan para pakar politik dan etikus di Jerman. Mengurangi penekanan pada doa, meskipun doa adalah krusial untuk proses penciptaan perdamaian dan itu secara implisit dilakukan dalam keseluruhan proses, secara khusus untuk mengasihi musuh (*praying for them*) dan mengakui bahwa kita terjebak dalam lingkaran setan, dan kebutuhan kita akan anugerah dalam proses penciptaan perdamaian. Meskipun

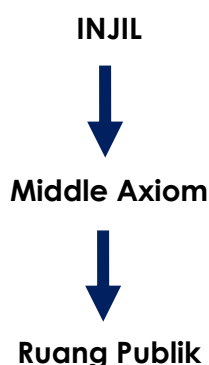
²⁷ Ibid, p. 37-38.

demikian “*middle axiom* dari etika publik” ini tetap similar dengan langkah-langkah Alkitab. Langkah -langkah alkitabiyah dalam penciptaan perdamaian, membuat etika tersebut masuk akal, dan bukan perintah yang sewenang-wenang. Etika yang inklusif.²⁷ Berikut ini “Skema” berkaitan dengan aplikasi nilai-nilai Kekristenan dalam ruang publik:



Dalam skema ini nilai-nilai Alkitabiah diaplikasikan ke ruang publik secara eksplisit, hal ini diistilahkan sebagai semangat “perang salib” atau juga dapat digambarkan sebagai diterapkannya semacam “syariat-syariat” Kristen secara harfiah (bnd. negara-gereja). Dalam upaya pemberlakuan syariat Islam di beberapa daerah yang mayoritas penduduknya beragama Islam, dapat menimbulkan upaya lain yaitu pemberlakuan “syariat-syariat” agama yang lain, tergantung pada agama apa yang paling besar pengikutnya di daerah tersebut. Dan bilamana hal itu terjadi maka potensi terjadinya disintegrasi bangsa menjadi lebih besar. Atau minimal berpotensi terjadinya tindakan diskriminasi, bahkan kekerasan terhadap mereka yang berbeda agama.

Model seperti di atas kurang tepat untuk diterapkan dalam konteks negara Plural seperti Indonesia. Model yang lebih tepat untuk diterapkan dalam konteks ke-Indonesiaan adalah model “*middle axiom*” yang skemanya adalah sebagai berikut:



²⁷ Ibid, p. 93-94.

Dalam *middle axiom*: Istilah-istilah/nilai-nilai agama kristen diformulasikan ulang dan diaktualisasi dengan ruang publik. *Axioma* berfungsi menjembatani dari yang partikular menuju yang universal. Dalam konteks negara yang plural seperti di Indonesia, menurut saya, wacana Stassen perlu dipertimbangkan untuk diaplikasikan sebagai kontribusi peran politis gereja yang dibangun dalam kerangka peran "inspirasional" gereja yaitu nilai-nilai Kristiani diharapkan dapat memberi inspirasi bagi perumusan tatanan kehidupan bersama yang lebih baik. Bukan menjadikan norma-norma Kristen sebagai "syariat" Kristen secara harfiah. Atau bagaimanakah nilai-nilai kristiani dapat memberikan inspirasi bagi penciptaan teori-teori etika sosial, etika politik, tata negara, bagi penciptaan kehidupan yang memproklamasikan perdamaian, keadilan dan kesejahteraan bersama.

Purna-wacana

Setelah mengkaji dua peran politis agama di negara plural yaitu "aspirasi" atau "inspirasi" ditinjau dari teori sosial "*Thick and Thin*" *Moral Argument At Home and Abroad*, maka peran "inspirasional" agama lebih membawa harapan bagi terciptanya kehidupan berbangsa yang damai, adil, dan sejahtera. Sebaliknya penerapan peran politis "aspirasi" agama bagi Indonesia yang majemuk berpotensi menimbulkan terjadinya disintegrasi bangsa dan tindakan kekerasan atau pemaksaan terhadap penganut agama lain untuk mengikuti syariat agama yang bukan menjadi keyakinannya. Dengan demikian ketika aspirasi agama dijadikan aspirasi bagi bangsa Indonesia yang majemuk ini, hal itu berpotensi terjadinya tindakan-tindakan diskriminasi, kekerasan dan ketidakadilan terhadap penganut agama yang berbeda. Hal itu juga similar dengan Stassen yang menekankan penting "*middle axiom*". Di mana nilai-nilai agama yang partikularistik tidak secara eksplisit diterapkan sebagai etika publik, tetapi menjiwai tatanan kehidupan bersama sebagai bangsa yang majemuk.

Dalam negara yang masyarakatnya majemuk seperti Indonesia peran "inspirasional" agama lebih memberi harapan bagi lestarnya kehidupan berbangsa. Karena nilai-nilai inti agama diharapkan dapat menjadi inspirasi (bukan diterapkan sebagai syariat) bagi tatanan kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang lebih damai, adil, aman dan sejahtera. Nilai-nilai berbagai agama yang hidup di Indonesia tidak harus di-syariatkan dalam tatanan hidup bersama, tetapi menginspirasi semua tatanan hidup bernegara yang ada. Ajaran-ajaran atau nilai-

nilai yang ada dalam Semua agama menjiwai atau menjadi spiritualitas dari tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebenarnya Pancasila adalah sebuah warisan yang luhur dari para pendiri bangsa ini. Pancasila merupakan representasi dari nilai-nilai "*thin* atau minimalis", yang ada dalam agama, budaya, kepercayaan, bahkan ideologi yang dihidupi oleh masyarakat Indonesia yang majemuk, sekaligus didalamnya terkandung cita-cita dan pengharapan bagi masa depan bangsa Indonesia yang berketuhanan, damai, adil, sejahtera, dan demokratis.

Selanjutnya berkaitan dengan peran politis gereja dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, barangkali penting untuk mengembangkan sebuah etika publik yang berakar pada nilai-nilai Aklitab, tetapi dalam pengaplikasiannya menggunakan model "*middle axiom*", bukan diterapkan sebagai "syariah" tetapi menginspirasi bagi upaya terciptanya tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang damai, adil, dan sejahtera. Sebuah kehidupan yang menjunjung tinggi harkat dan martabat sesamanya, tidak melakukan tindakan kekerasan terhadap sesamanya, sebaliknya menebarkan benih-benih cinta kasih terhadap sesamanya tanpa memandang latar belakang suku, ras, golongan dan agamanya.

Daftar Pustaka

Alkitab. LAI.

Bulton, G. Wayne.ed. *From Christ to The World*. Grand Rapids: Wm.B. Eerdmans, 1994.

Darmaputra, Eka. *Bukan Keterpisahan, Tapi Kemitraan" Etika Politik Dalam Konteks Indonesia*. Yogyakarta: Kanisius, 2001.

Gus Dur, *Mengurai Hubungan Negara dan Agama*. Jakarta: Grasindo, 1999.

Haeurwas, Stanley, *A Community of Character Toward a Constructive Christian Social Ethic*. Notre Dame: University of Notre Dame Press, 1998.

Moelyono, Anthon M, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1990.

Lefebure, D. Leo, *Penyataan Allah, Agama dan Kekerasan*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2003.

M, Norhalis. "Agama dan Kekerasan" dalam *Newsletter Edisi Khusus: Agama dan kekerasan*. Yogyakarta: Dian/Interfidei, 2003.

Magnis Suseno, Franz. *Etika Politik. Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta: Gramedia, 1987.

Purwanto, Edi. *Agama, Politik dan Negara: Perpektif Katolik, dalam Agama dan Negara*. Ed. Th. Sumartana, dkk. Yogyakarta: Dian/Interfidei, 2002.

Qodir, Zuly, *Agama dalam bayang Bayang Kekuasaan*, Yogyakarta: Dian/Interfidei, 2001.

Susetyo, Benny, *Vox Populi Vox Dei*. Malang: Averrous Press, 2004.

Saputro, Eko, *Memahami Wajah Para Pembela Tuhan*, Yogyakarta: Dian/Interfidei, 2004.

Stassen, Glenn. *Just Peacemaking, Transforming Inisiative For Justice and Peace*. Wesminters: John Knox Press, 1992.

Suhadi, "Gejala Bergesernya Tembang Ilir-Ilir Menjadi Perda Syariat Islam" dalam *Newsletter Edisi Khusus: Agama dan kekerasan*, Yogyakarta: Dian/Interfidei.

Walzer, Michael, *Thick and Thin, Moral Argument At Home and Abroad*, Notre Dame: University of Notre Dame Press, 1994.

Yoder, John. H. *The Politic of Jesus: Behold The Man! Our Victorious Man*. Michigan: Eerdman Publishing, 1994).